

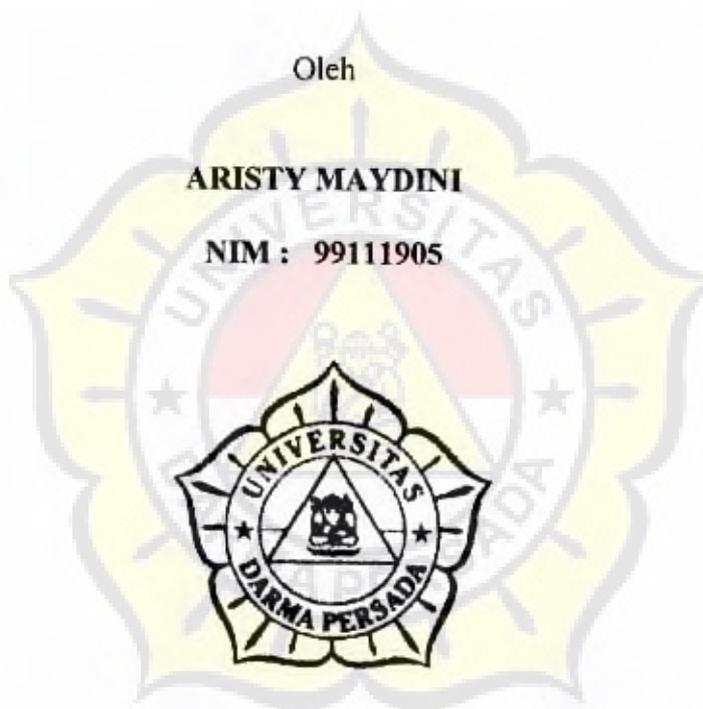
**WANITA DALAM PARLEMEN DI JEPANG
SETELAH PERANG DUNIA II SAMPAI AWAL TAHUN 1990-AN**

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai
salah satu persyaratan mencapai gelar
Sarjana Sastra

Oleh

ARISTY MAYDINI

NIM : 99111905



**JURUSAN SASTRA JEPANG
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

JAKARTA

2001

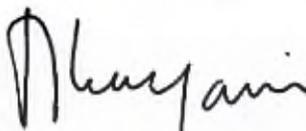
Skripsi Sarjana yang berjudul :

WANITA DALAM PARLEMEN DI JEPANG

SETELAH PERANG DUNIA II SAMPAI AWAL TAHUN 1990-AN

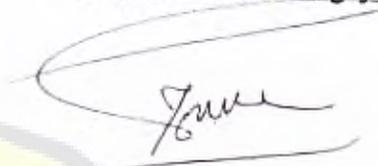
Telah diuji dan diterima baik (lulus) pada tanggal 1 bulan Agustus, tahun 2001 di hadapan Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Sastra

Pembimbing / Penguji



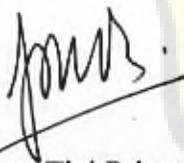
(DR. Ekayani Tobing, SS, M.Hum)

Ketua Panitia / Penguji



(Dra. Purwani Purawiardi)

Penguji



(Dra. Tini Priantini)

Sekretaris Panitia / Penguji



(Nani Dewi Sunengsih, SS)

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang



(Dra. Yuliasih Ibrahim)

Dekan Fakultas Sastra



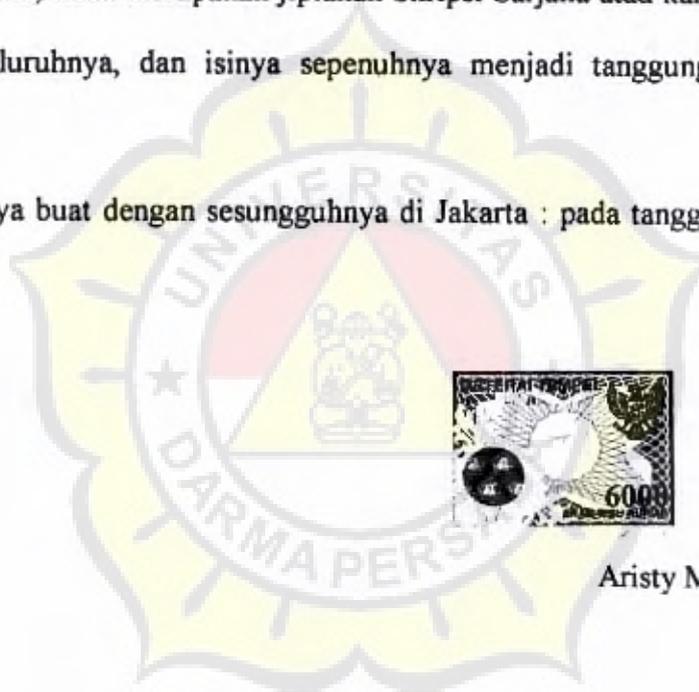
(Dra. Inny C. Haryono, MA)

Skripsi Sarjana yang berjudul :

**WANITA DALAM PARLEMEN DI JEPANG
SETELAH PERANG DUNIA II SAMPAI AWAL TAHUN 1990-AN**

merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan DR. Ekayani Tobing, SS, M.Hum, tidak merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta : pada tanggal 1 Agustus 2001



Aristy Maydini

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikankan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan strata satu (S-1) guna mencapai gelar sarjana pada Jurusan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Darma Persada Jakarta.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan, penyajian maupun pembahasan materi. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis dalam pengetahuan, pengalaman maupun kemampuan yang penulis miliki.

Berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat teratasi. Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dra. Inny C. Haryono, MA, selaku Dekan Fakultas Sastra.
2. Dra. Yuliasih Ibrahim, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang.
3. DR. Ekayani Tobing, SS, M. Hum, selaku pembimbing.
4. Dra. Tini Priantini, selaku pembaca.
5. Dra. Purwani Purawiardi, selaku Ketua Panitia sidang skripsi dan penguji
6. Nani Dewi Sunengsih, SS, selaku Sekretaris sidang skripsi dan penguji.

7. Seluruh staff pengajar dan karyawan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.
8. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, kakak serta adik yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terwujud.
9. Dwinanto yang telah memberikan dorongan dan waktunya.
10. Rekan-rekan yang telah memberikan bantuan.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya dan membalas segala budi baik semuanya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini memenuhi fungsinya dan bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 1 Agustus 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Ruang Lingkup	6
1.5. Metode Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II WANITA DAN PARLEMEN DI JEPANG	9
2.1. Peran Dan Kedudukan Wanita Jepang Setelah Perang Dunia II	9
2.2. Pandangan Wanita Terhadap Dunia Politik	14
2.3. Parlemen	18
BAB III PARTISIPASI POLITIK WANITA DALAM PARLEMEN	25
3.1. Latar Belakang Wanita Jepang Masuk ke Dalam Dunia Politik	25

3.1.1. Faktor Dari Luar Negeri	25
3.1.2. Faktor Dari Dalam Negeri	28
3.2. Peran Dan Jumlah Wanita Jepang Dalam Parlemen	33
3.3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wanita Jepang Dalam Parlemen ..	36
3.3.1. Biaya Yang Besar	37
3.3.2. Perbedaan Jender	39
3.3.3. Kurangnya Dukungan Partai	40
3.3.4. Beban Ganda	43
3.4. Usaha Untuk Meningkatkan Jumlah Wanita Dalam Parlemen	44
BAB IV PENUTUP	47
4.1. Kesimpulan	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki abad 20 banyak dijumpai pergerakan yang dilakukan oleh kaum wanita di berbagai negara dengan tujuan untuk memperoleh persamaan hak dan kedudukan dengan pria. Pergerakan ini juga bertujuan untuk mendapatkan kesetaraan dalam bidang politik dan kehidupan bermasyarakat yang merupakan hak pokok bagi wanita untuk memperoleh persamaan hak dalam segala bidang.

Partisipasi wanita dalam bidang politik dan kehidupan bermasyarakat adalah hak pokok untuk memperoleh perbaikan status wanita dan itu merupakan hak dasar bagi wanita untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.¹

Pergerakan ini didorong pula dengan adanya pengakuan hak suara wanita dalam pemilihan umum di empat negara yaitu Swedia, Selandia Baru, Australia dan Inggris. Hal ini membawa perubahan yang besar di berbagai negara yaitu mulai adanya pengakuan dan persamaan hak bagi wanita dalam bidang politik.

Hak-hak politik perempuan merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia dan sebaliknya hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari berbagai kerangka kerja demokratik.²

¹ _____, *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary*, Shogakusha, Tokyo, 1992, Hal. 139.

² Karam, Azza, dkk. *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 1999, Hal. 6.

Perolehan hak memilih serta hak untuk dipilih bagi wanita merupakan cita-cita dasar dari pergerakan wanita dengan tujuan untuk menetapkan tingkatan mengenai status wanita dan sebagai bagian dari pencapaian persamaan hak antara pria dan wanita serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita khususnya dalam bidang politik.

Pergerakan wanita Jepang untuk memperoleh hak dalam bidang politik telah dimulai setelah Restorasi Meiji, namun belum semua wanita sadar untuk mendapatkan hak mereka dalam politik. Hal ini dikarenakan adanya larangan bagi wanita untuk berpartisipasi dalam politik dan adanya anggapan bahwa wanita seharusnya berada di rumah. Tetapi sejak berakhirnya Perang Dunia II masyarakat Jepang terutama wanita telah sadar akan masalah politik ketika para wanita telah tertarik pada bidang politik lebih dari sebelumnya dan pandangan mereka tentang tempatnya dalam kehidupan politik telah mengalami perubahan yang besar.

Cara kehidupan masyarakat selama perang –mereka yang berada dalam pergerakan memaksa wanita untuk berhubungan dengan masalah politik yang akhirnya menarik mereka ke dalam dunia politik.³

Perubahan ini dikarenakan mulai disingkirkannya pemikiran tradisional yang membatasi ruang gerak wanita dan adanya perbaikan kedudukan wanita dengan pengakuan status wanita Jepang. Pergerakan wanita Jepang ini mencapai hasilnya dengan diperolehnya hak politik secara sah dengan

³ Robins-Mowry, Dorothy, *The Hidden Sun: Women of Modern Japan*, West View Press, Colorado, 1983, Hal. 87.

ditetapkannya hak wanita dalam Undang - Undang untuk berpartisipasi dalam politik pada tahun 1945, secara tidak sengaja karena kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan pendudukan tentara Sekutu di Jepang.

*Artikel 14 (1) : semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam hukum dan tidak ada diskriminasi dalam politik, ekonomi, atau sosial berdasarkan ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial atau keturunan.*⁴

Dengan pengakuan hak suara ini wanita Jepang telah masuk ke dalam arena politik sebagai pemilih dan peserta aktif yang memberikan nuansa baru bagi kehidupan berpolitik di Jepang. Dari sebagian para wanita tersebut tidak memiliki pengalaman dalam berpolitik, oleh karena mereka memasuki dunia politik secara tiba-tiba tanpa didahului oleh persiapan yang cukup dan bertahap.

Partisipasi wanita dalam bidang politik untuk pertama kalinya setelah pengakuan hak wanita yaitu pada pemilihan umum pertama setelah Perang Dunia II pada tahun 1946. Namun sebelum pemilihan umum ini dilaksanakan banyak orang terutama kaum pria yang menyangsikan akan kemampuan dan minat wanita dalam politik, tetapi kesangsian itu tidak terbukti.

*Sebelum pemilihan umum diadakan di bulan April 1946, anggota dari majelis rendah memperlihatkan ketakutan bahwa : kesadaran masyarakat masih belum berkembang dan sejak wanita tidak memiliki tanggung jawab dalam berpartisipasi di dunia politik, proporsi dari orang yang tidak memilih mungkin lebih dari 50 persen.*⁵

⁴ _____, *Japanese Women: New Feminist Perspectives On The Past, Present and Future*, The Feminist Press, New York, 1995, Hal. 353.

⁵ Sumiko, Iwao, *The Japanese Women: Traditional Image and Changing Reality*, The Free Press, New York, 1993, Hal. 218.

Pada pemilihan umum ini 67 persen dari seluruh wanita di Jepang memberikan suaranya dan bukan hanya itu saja 79 orang wanita menjadi calon anggota parlemen dan 39 orang wanita memenangkan kursi di majelis rendah. Hal ini membawa gelombang wanita secara tiba-tiba ke dalam Diet nasional. Oleh karenanya pemilihan umum yang pertama ini merupakan sebuah cerminan dari ledakan semangat dan antusias awal untuk hak yang baru saja mereka peroleh.

Peran serta wanita Jepang dalam dunia politik merupakan perkembangan dan pengalaman baru yang tiba-tiba melembaga. Hal ini tentu saja memberikan dampak bagi kehidupan politik nasional Jepang yang merupakan konsekuensi dari sebuah nilai perubahan yang mengambil tempat dalam corak politik Jepang. Dengan memberikan kesempatan kepada wanita untuk berpartisipasi mengikuti pemilihan umum, membuka pintu gerbang bagi wanita untuk bergabung ke dalam lembaga-lembaga yang ada. Secara umum partisipasi wanita Jepang dalam kegiatan politik adalah rendah namun terdapat pengecualian yaitu, pada pemilihan umum nasional di tahun 1946. Pada tahun ini untuk pertama kalinya wanita Jepang diperbolehkan berpartisipasi dalam dunia politik yaitu dengan perolehan hak untuk memilih dan dipilih. Kehadiran wanita dalam mencalonkan diri dan memilih dalam pemilihan melebihi kaum pria. Tetapi kemudian mereka disarankan untuk mempercayakan kegiatan politik kepada pria. Mereka diharapkan hanya untuk memilih wakil pria dan menunggu sampai pemilihan berikutnya untuk mempertegas dan mengajukan kembali tuntutan mereka

kepada para politisi pria. Ketika mereka menerima saran ini, hal tersebut tidak mengurangi minat dan keinginan mereka untuk ikut berpolitik. Meskipun telah diketahui bahwa pria terlalu menunjukkan kecenderungan yang kecil untuk mendukung wanita berpartisipasi dalam dunia politik.⁶

Meskipun hak politik bagi wanita telah dijamin secara hukum di Jepang, tetapi dalam kenyataannya masih adanya perbedaan yang diterima oleh wanita dalam bidang politik dan juga tidak adanya perbaikan yang cukup baik dalam status politik dan kehidupan bermasyarakat bagi wanita di Jepang. Hal ini menyebabkan jumlah wanita yang menjadi anggota Diet terutama dalam majelis rendah cenderung mengalami penurunan pada pemilihan umum di tahun berikutnya. Sedangkan dalam majelis tinggi wanita dipilih untuk pertama kali tahun 1947 dengan 11 orang wanita yang terpilih, tetapi walaupun jumlah mereka mengalami peningkatan tetapi keberadaan wakil wanita dalam majelis tinggi tidak terlampau besar.

1.2. Permasalahan

Sampai sekarang wanita dapat dipilih menjadi anggota parlemen. Walaupun mereka telah menggunakan hak mereka secara tetap, partisipasi dan jumlah mereka dalam Diet nasional masih rendah. Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengapa jumlah wanita dalam Diet

⁶ Bernard, Eccleston, *State and Society in Post War Japan*, Polity Press, 1993, Hal. 195.

Nasional masih rendah, meskipun wanita telah mendapatkan dan menggunakan haknya secara tetap.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran dan menunjukkan kepada pembaca akan keberadaan dan peranan wanita Jepang dalam bidang politik khususnya dalam parlemen di Jepang.

1.4. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pokok pembahasan yaitu peran dan kedudukan wanita dalam parlemen di Jepang, terutama dalam Majelis Rendah dan Majelis Tinggi dalam era setelah berakhirnya Perang Dunia II sampai dengan era awal tahun 1990-an.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang menjadi koleksi Perpustakaan Universitas Darma Persada, Perpustakaan Pusat Kebudayaan Jepang dan Perpustakaan CSIS.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun secara sistematis dalam V

(lima) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Masalah, Tujuan Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Metode penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : WANITA DAN PARLEMEN DI JEPANG

Dalam bab ini diuraikan tentang Peran dan Kedudukan Wanita Jepang Setelah Perang Dunia II, Pandangan Wanita Terhadap Dunia Politik, serta keadaan Parlemen di Jepang.

BAB III : PARTISIPASI POLITIK WANITA JEPANG DALAM PARLEMEN

Dalam bab ini diuraikan tentang Faktor-faktor Wanita Jepang Masuk ke Dalam Dunia Politik yang terdiri dari Faktor Dari Luar Negeri dan Dalam Negeri, Peran Dan Jumlah Wanita Jepang Dalam Parlemen, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wanita Dalam Parlemen yang terdiri dari Biaya Yang Besar, Perbedaan Jender, Kurangnya Dukungan Partai dan Beban Ganda, serta Usaha Untuk Meningkatkan Jumlah Wanita Dalam Parlemen.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menghasilkan kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan dari penelitian yang dilakukan.

